

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Tercatat Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara terpadat di dunia (Mustofa, 2019). Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja. Sumber daya manusia ini akan berperan penting sebagai aktor untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Oleh karena itu, sumber daya manusia ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya sehingga mampu memperoleh penghasilan yang cukup dan memadai untuk dirinya sendiri serta keluarganya.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa, ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-Undang ini juga menyatakan tujuan pembangunan sumber daya manusia, sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Terwujudnya pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya.
4. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah dan jumlah tenaga kerja (SDM) yang besar, Indonesia masih belum bisa berkembang secepat yang diharapkan. Bahkan besarnya jumlah tenaga kerja tersebut menimbulkan masalah baru. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah pengangguran. Pengangguran sendiri adalah sebutan yang merujuk pada orang-orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja namun kurang dari 2 (dua) hari dalam satu minggu atau bisa dikatakan tidak produktif.

Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah ketenagakerjaan yang mendasar di Indonesia. Memang, jumlah angkatan kerja telah berkembang jauh lebih banyak daripada kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia saat ini. Artinya kesempatan kerja yang ada tidak dapat mengakomodasi kualifikasi angkatan kerja tersebut, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Masalah tingginya angka pengangguran ini diperparah dengan merebaknya Virus Covid-19 yang bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019 lalu. Virus tersebut secara resmi diberi nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh WHO (*World Health Organization*) pada Februari 2020. Identifikasi virus Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 yang mempunyai kemiripan dengan SARS (*Severe Auto Respiratory Syndrome*) dan MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) (Hanifah, 2021). Virus ini terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang terkena pandemi Covid-19, dengan kasus positif pertama muncul pada awal Maret 2020 dan masih berlangsung.

Pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 telah berdampak serius pada banyak aspek kehidupan masyarakat mulai dari sektor sosial, sektor ekonomi termasuk sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sebagai bentuk respon terhadap pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan salah satunya

dengan mulai mensosialisasikan gerakan *social distancing* atau masyarakat biasa menyebut *#dirumahaja*, juga mengeluarkan kebijakan untuk WFH (*Work from Home*) dan SFH (*School from Home*). Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sebagian besar wilayah Indonesia, ini merupakan strategi Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini semakin menyebar luas (Krisnandika, Aulia, & Jannah, 2021).

Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membatasi kegiatan rumah tangga dan produktivitas usaha dalam bentuk pembatasan mobilitas masyarakat serta kegiatan usaha, sehingga berdampak pada turunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Akibatnya, Indonesia mengalami penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan turunnya tingkat produksi dan pendapatan perusahaan, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi (Syahrial, 2020). Selain itu, banyak pelaku usaha menengah yang menutup usahanya karena himbauan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan berupa jaga jarak, tidak diizinkan berkumpul, tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar rumah demi mencegah penularan Covid-19 tersebut. Baik itu Kantor, Perusahaan dan Pabrik juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19, yang di mana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam ruangan atau WFH (*work from home*).

Menurut pemantauan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (*International Labour Organization*) karena sejumlah kebijakan baru selama pandemi Covid-19, telah mempengaruhi hampir 2,7 miliar pekerja, yang sudah mencapai sekitar 81% dari angkatan kerja global. sudah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81% tenaga kerja dunia. Oleh karena itu, kinerja perekonomian yang mengalami penurunan ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja, terutama di Indonesia, di mana pengangguran meningkat (Hanifah, 2021).

Tingkat pengangguran yang tinggi ini tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga masyarakat. Karena secara ekonomi, tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu penyebab hilangnya potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban dalam mengatasi masalah pengangguran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:

1. Perencanaan tenaga kerja adalah proses sistematis penyusunan rencana tenaga kerja sebagai dasar dan acuan untuk merumuskan kebijakan, strategi dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja yang berkelanjutan.
2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan dalam rangka menghubungkan pekerja dengan pemberi kerja sehingga pekerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, pengusaha dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya (Dewi R. , 2020).

Penurunan produksi menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, yang mau tidak mau berujung pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan. Pilihan merumahkan dan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada karyawan ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan baik skala kecil maupun besar untuk menghindari atau mengurangi kerugian akibat pandemi Covid-19. Bahkan terkadang perusahaan membuat keputusan yang ekstrim seperti memberlakukan prinsip *no work no pay* (Juaningsih, 2020).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 164 dan 165 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kurang lebih mengatur bahwa perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan jika perusahaan tersebut mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau karena *force majeure* (keadaan memaksa) ataupun karena perusahaan melakukan efisiensi (Hanifah, 2021). Tetapi secara umum, beberapa perusahaan yang masih beroperasi selama pandemi Covid-19 ini sering memakai alasan *force majeure* untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), padahal perusahaan tersebut mampu memproduksi meski tidak maksimal.

Berbicara mengenai masalah pengangguran akibat pandemi Covid-19, hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi Pemerintah Pusat tetapi juga bagi Pemerintah Daerah. Seperti halnya yang dialami Pemerintah Kota Bekasi, di mana tingkat pengangguran terbukanya meningkat cukup tinggi hanya dalam kurun waktu setahun terakhir. Hal ini terjadi karena banyaknya perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap pekerjanya dengan alasan daya produksi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Seperti yang dikatakan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ibu Wulandari Rabu (29/12/2021) yang mengatakan:

“Untuk sekarang ada sekitar 1.600an pekerja yang di PHK dan itu kemungkinan akan terus bertambah. Mereka yang terkena PHK ini biasanya dari tenaga kerja kontrak yang tidak diperpanjang lagi kontraknya sama perusahaan karna alasan produksi yang menurun akibat pandemi, jadi ini salah satu faktor yang bikin tingkat pengangguran terbuka kita terus bertambah”.

Berikut ini merupakan data jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi yang tercatat dari tahun 2019 hingga 2021:

Tabel 1. 1
Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bekasi

No	Tahun	Jumlah Pengangguran	TPT (%)
1	2019	102.295	8,30%
2	2020	104.729	10,68%
3	2021	104.939	10,88%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2021

Menyebarnya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan di Kota Bekasi. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 memperlihatkan bahwa

tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 10,68% atau mengalami kenaikan 2,38% dari tingkat pengangguran pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,30%. Kemudian, pada tahun 2021 tercatat pengangguran terbuka di Kota Bekasi berada di angka 10,88% atau kembali mengalami kenaikan 0,2% dari tahun 2020.

Hal ini menandakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa pandemi Covid-19 di Kota Bekasi masih kurang maksimal. Adapun strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam mengurangi angka pengangguran yaitu dengan mensosialisasikan informasi pasar kerja melalui bursa kerja (*job fair*). Meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program pelatihan kerja, seperti program pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis teknologi dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Lalu, meredam perselisihan antara pekerja dan perusahaan agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Hal tersebut juga diperkuat oleh penuturan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ibu Wulandari Rabu (29/12/2021) yang mengatakan:

“Memang strategi kinerja program yang kita lakukan itu tidak berjalan sesuai sama yang kita harapkan di perencanaan awal, contohnya saja di penyerapan tenaga kerja baru itu ternyata masih kurang terserap karena ya di situasi sekarang walaupun ekonominya sudah mulai membaik tapi banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menstabilkan dulu tingkat produksi perusahaannya daripada membuka lowongan kerja bagi pekerja baru. Ada sisi baiknya juga ya, jadi perusahaan mampu bangkit dan bisa membayar gaji tenaga kerjanya dengan benar sesuai umr. Tapi, kita tetap berusaha untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pencari kerja yang terdaftar agar mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kompetensinya”.

Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi harus berperan aktif dalam mengatasi masalah pengangguran tersebut. Karena pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan, kriminalitas dan lainnya. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja dapat mendorong terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan penunjang

pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan pembangunan sumber daya manusia di Kota Bekasi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah merupakan bagian dari kewenangan penyelenggara daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi membantu Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsinya yaitu: memperluas kesempatan kerja, menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka dan menentukan arah pembangunan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kota Bekasi.

Setiap tahunnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun dokumen perencanaan kerja periode 1 (satu) tahun atau biasa disebut rencana kerja (RENJA). Penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan rencana strategis Pemerintah Kota Bekasi dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Hal ini juga disampaikan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ibu Wulandari Rabu (29/12/2021) yang mengatakan:

“Sebenarnya kita rutin mengadakan program dan kegiatan untuk para pencaker. Seperti pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, pola pemagangan, bursa kerja dan lainnya. Itu termasuk strategi kita dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja yang lebih luas agar tingkat pengangguran terbuka berkurang. Tapi karna ada Covid-19 ini jadi pelaksanaannya sedikit terhambat”.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, membuat beberapa program dan kegiatan rutin Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhambat pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja diharapkan bisa memberikan berbagai solusi serta upaya yang di harap mampu mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi. Apabila, penyelesaian masalah pengangguran ini tidak dilakukan secara optimal, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, maka masalah pengangguran di Kota Bekasi harus segera dituntaskan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah “Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi”.

1.4. Signifikasi Penelitian

1.4.1. Signifikasi Akademik

Berdasarkan permasalahan tentang “Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi” diharapkan penelitian ini berjalan lancar. Selain itu adanya hasil studi terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis

dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam memperkaya referensi penulis menyajikan beberapa penelitian sebagai berikut :

Devina Wida Arum Sari. Berjudul “Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Melalui *Job Fair* di Kabupaten Boyolali”. (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Boyolali melalui *job fair* yang dilaksanakan melalui kegiatan yang bertajuk Boyolali Job Market Fair. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada pencari kerja (penganggur, setengah penganggur maupun yang sudah bekerja) mengenai lowongan pekerjaan yang ada. Sasaran dari *Job Fair* ini ialah penganggur yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja untuk mencari kerja, membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan jabatan, mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.

Nurul Huda. Berjudul “Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Dalam Menanggulangi Pengangguran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur”. (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau program apa saja yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menanggulangi pengangguran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur telah mampu melaksanakan beberapa program unggulan yang terbukti dapat memberdayakan masyarakat Kutai Timur khususnya di pedalaman (Sangatta) sehingga masyarakat yang termasuk dalam kategori pengangguran musiman bisa mendapatkan pekerjaan melalui program kerja yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.

Sri Sutjiatmi, dkk. Berjudul “Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Menangani Pengangguran di Kabupaten Tegal”. (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal mengadakan kegiatan pelatihan untuk para pengangguran, bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, lembaga pelatihan dan perusahaan serta mensosialisasikan langsung lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penanganannya seperti kurangnya anggaran yang tersedia, rendahnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia pegawai serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan dan keahlian. Maka dari itu disarankan untuk mereformasi pelatihan kerja, membimbing usaha secara mandiri dengan memanfaatkan kondisi alam di Kabupaten Tegal.

Indah Septiana Dewi. Berjudul “Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Terhadap Tenaga Kerja atas Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Covid-19”. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dalam melindungi para tenaga kerja yang dirumahkan akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Hasil dari penelitian ini dipahami bahwa peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak dari Covid-19 ini telah melakukannya himbauan terhadap para perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palembang agar tidak semakin meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan karena adanya Covid-19.

Riska Dewi. Berjudul “Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Dumai”. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Dumai dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengurangi masalah angka pengangguran. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai belum berjalan secara optimal. Adapun, faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai ialah sumber daya manusia dan anggaran.

Syahrial. Berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia”. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja serta melihat bagaimana perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa karna pandemi Covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja. Ketidak menentuan dan kesulitan hidup menjadikan beberapa kelompok rentan ini memerlukan jaring pengaman sosial, seperti jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Melalui penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka kehidupan masyarakat yang paling rentan menjadi terlindungi, baik pada saat tidak ada krisis maupun saat krisis akibat pandemi Covid-19.

Agus Olester Sitorus, dkk. Berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Banda Aceh”. (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Banda Aceh dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam membuka lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua (2) peranan yang penting dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam memperluas kesempatan kerja, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai komunikator. Selain itu Dinas Tenaga Kerja berupaya memberikan pelatihan berbasis kompetensi, wirausaha, dan kemasyarakatan, mengadakan *job fair*, dan melakukan *job canvassing*.

Fitra Rizal, dkk. Berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19”. (2021). Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar 46,6 miliar dollar AS, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dollar AS. Menyediakan program penguatan ekonomi seperti insentif pajak penghasilan,

relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TGM), dan Kewirausahaan. Serta menyediakan panduan perlindungan kerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit kerja akibat Covid-19.

Ida Hanifah. Berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja di Masa New Normal”. 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 bagi para tenaga kerja dan bagaimana kebijakan Pemerintah dalam mensejahterakan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan Covid-19 yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip “*no work no pay*” (tidak bekerja, tidak dibayar). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan.

Verina Ruth Krisnandika, dkk. Berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran di Indonesia”. (2021). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pengangguran di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia terus meningkat seiring adanya pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hal tersebut seperti mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk meringankan biaya pinjaman bagi masyarakat, mengeluarkan kebijakan fiskal dengan memotong pajak serta memberikan perpanjangan waktu untuk membayar pajak dan memberikan pelatihan kerja melalui program Kartu Prakerja. Terakhir, melakukan diversifikasi ekonomi dengan mencari usaha baru berupa produk barang dan jasa yang dapat membantu mendapatkan pendapatan baru seperti misalnya dibidang fashion dapat membuat pakaian pelindung diri kesehatan (APD), masker dan lainnya.

Secara garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas ialah pada objek penelitian, peneliti memilih objek penelitian skripsi ini di Dinas Tenaga Kerja Kota yang di mana belum adanya penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi angka pengangguran di Masa Pandemi Covid-19. Selain itu, sejauh ini penelitian yang peneliti temukan secara umum membahas mengenai strategi mengatasi pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Kabupaten/Kota lain tanpa melibatkan kondisi atau fenomena yang terjadi selama 2 tahun kebelakang, yaitu pandemi Covid-19. Selain itu, apabila ada penelitian serupa terkait mengatasi masalah pengangguran akibat Pandemi Covid-19 ini dibahas lebih luas seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rizal dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19”.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui posisi penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Devina Wida Arum Sari (2015)	Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Melalui Job Fair di Kabupaten Boyolali	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam mengurangi angka pengangguran melalui “Boyolali Job Market Fair” cukup berhasil dan dinilai baik karena manajemen pelaksanaannya membantu memberikan informasi kepada pencari kerja serta perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan jabatan.
2	Nurul Huda (2016)	Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Dalam Menanggulangi Pengangguran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur	Penelitian Kualitatif Deskriptif	DISNAKERTRANS Kabupaten Kutai Timur mampu melaksanakan beberapa program unggulan yang terbukti dapat memberdayakan masyarakat yang tergolong ke dalam pengangguran musiman.
3	Sri Sutjiatmi & Novisari Puspita (2019)	Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Menangani Pengangguran di Kabupaten Tegal	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Meski masih terdapat beberapa kendala dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan dinas/lembaga pelatihan dan perusahaan mensosialisasikan langsung lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja.

1	2	3	4	5
4	Indah Septiana Dewi (2020)	Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Terhadap Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Covid-19	Penelitian Kualitatif	Dinas Tenaga Kerja memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena PHK serta menghimbau perusahaan-perusahaan di Kota Palembang agar tidak melakukan PHK Massal karena Covid-19.
5	Riska Dewi (2020)	Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Dumai	Penelitian Kualitatif	Dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum melaksanakannya secara maksimal. Karena ada beberapa faktor serta indikator strategi yang belum berjalan secara efektif.
6	Syahrial (2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia	Penelitian Kualitatif	Pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja. Misalnya pekerja musiman dan migran yang tidak bisa kembali dan mengakses jaminan sosial.
7	Agus Olester Sitorus, Alfi Rahman & Helmi (2021)	Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Banda Aceh	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh melakukan 2 peran penting yaitu: sebagai fasilitator, di mana Dinas Tenaga Kerja memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan dan memberikan bantuan peralatan bagi pengusaha dan sebagai komunikator, di mana Dinas Tenaga Kerja memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lowongan pekerjaan serta melakukan kerja sama kepada pihak swasta dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh.

1	2	3	4	5
8	Fitra Rizal & Haniatul Mukaromah (2021)	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran akibat Covid-19 dengan mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19, menyediakan program penguatan ekonomi, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal, memberikan insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja, serta menyediakan panduan perlindungan kerja dan kelangsungan usaha.
9	Ida Hanifah (2021)	Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja di Masa New Normal	Penelitian Kualitatif <i>Literatur Riview</i>	Diberlakukannya PSBB membuat perusahaan terpaksa merumahkan hingga mem-PHK karyawannya bahkan memberlakukan prinsip “no work no pay”. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan.
10	Verina Ruth Krisnandika, Darin Aulia & Luluul Jannah (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran di Indonesia	Penelitian Kualitatif <i>Literatur Riview</i>	Jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat selama Covid-19, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti mengeluarkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta memberikan pelatihan kerja melalui program Prakerja.

Sumber : Peneliti, diolah 2021

1.4.2. Signifikasi Praktis

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi, selain itu untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini bisa untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan terkait dari penelitian strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan perspektif teoritik, teori-teori, dan kerangka pemikiran yang akan digunakan terhadap penelitian yang berjudul strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa pandemi Covid-19 di Kota Bekasi beserta asumsi penelitiannya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data yang digunakan dalam proses penelitian serta tempat dan waktu

penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang terletak di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.

BAB V : SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari uraian-uraian pembahasan terkait strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran di masa pandemi Covid-19 di Kota Bekasi, yang dijabarkan di bagian akhir penelitian ini yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN